

## BAB IV

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### 4.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### A. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar 438.940 Ha atau 4.389,40 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan laut seluas 3.760,33 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sebesar 687,43 Km<sup>2</sup>. Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luas wilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km<sup>2</sup> atau 29,26% dari luas wilayah perairan laut Propinsi Nusa Tenggara Barat 12.852,14 Km<sup>2</sup>.

Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Timur : Selat Sape
- Sebelah Barat : Kabupaten Dompu

Secara administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18 kecamatan, 191 desa, 782 Dusun, 1.048 Rukun Warga (RW) dan 2.475 Rukun Tetangga (RT), dengan wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tambora dengan luas 62.782 ha atau sebesar 14,30%, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 ha atau 1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian, Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sape dengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desa sebanyak 5 desa, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun di**  
**Kabupaten Bima Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah			
			Desa	Dusun	RT	RW
1	Monta	22.752	14	45	162	68
2	Parado	26.129	5	18	61	23
3	Madapangga	23.758	11	41	147	44
4	Woha	10.557	15	63	173	80
5	Belo	4.476	9	33	119	50
6	Langgudu	32.294	15	59	168	76
7	Wawo	13.229	9	30	119	48
8	Sape	23.212	18	70	255	117
9	Lambu	40.425	14	40	180	82
10	Wera	46.532	14	82	224	103
11	Ambalawi	18.065	6	38	122	45
12	Donggo	12.383	9	46	125	49
13	Sanggar	47.789	6	22	59	26
14	Tambora	62.782	7	24	54	25
15	Bolo	6.693	14	71	180	73
16	Soromandi	34.166	7	52	134	61
17	Lambitu	6.540	6	15	42	17
18	Palibelo	7.158	12	33	151	61
<b>Kab.Bima</b>		<b>438.940</b>	<b>191</b>	<b>782</b>	<b>2.475</b>	<b>1.048</b>

Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016

**Gambar 4.1**  
**Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima**



Sumber Data : RTRW Kabupaten Bima, 2011

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur dari 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Woha. Secara geografis terletak pada:

- Barat – Timur :  $118^{\circ} 44' - 119^{\circ} 22'$  Bujur Timur
- Utara – Selatan :  $08^{\circ} 08' - 08^{\circ} 57'$  Lintang Selatan

**Gambar 4.2.**

### Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB



*Sumbe Data : RTRW Kabupaten Bima, 2011-2031*

## C. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bima bervariasi dari datar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086Ha (8,62%).
- Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712Ha (20,30%).

- Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242Ha (36,57%).
- Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391Ha (34,50%).

Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bima merupakan hamparan bergelombang. “Topografi daerah Kabupaten Bima umumnya berbukit-bukit. Luas wilayahnya mempunyai nilai topografi yang cukup bervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggian antara 714 meter di atas permukaan laut (mdpl)”.

#### **D. Geologi**

Geologi wilayah daerah Kabupaten Bima dibagi kedalam beberapa jenis bebatuan yaitu:

- 1) “Batuan endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir, lempung utama bersusun endisit dengan penyebaran terdapat dari daerah-daerah pegunungan sampai ke pantai”.
- 2) “Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api tua”.
- 3) “Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat, yang terdapat di daerah pantai”.
- 4) “Batuan terobosan merupakan batuan terobosan yang mempunyai susunan batuan yang tidak dapat dibedakan dan menerobos batuan hasil endapan gunung api, penyebarannya terdapat di daerah Bolo dan Monta”.

Di Kabupaten Bima, berdasarkan Peta Tanah Tinjau Mendalam Pulau Sumbawa Skala 1:100.000 (Kementan RI, 2011), tanah di Kabupaten Bima pada tingkat ordo diklasifikasikan sebagai Entisols, Inceptisols, Vertisols dan Andisols.

Pada tingkat yang lebih tinggi (Sub Grup) menurunkan 12 Sub Grup tanah. Uraian singkat masing-masing tanah di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

- a) Entisol merupakan tanah yang belum berkembang. Tanah ini terbentuk dari hasil pengendapan sungai atau marin/laut atau bahan induk yang lebih tua di daerah-daerah yang tererosi berat pada Fisiografi Volkan. Entisols merupakan Ordo tanah terluas kedua setelah Inceptisols yang mencapai luas 32,97% dari luas kabupaten atau 144.718 ha.
- b) Inceptisols adalah tanah yang baru berkembang (muda). Sebagian besar (57,02%) tanah- tanah di Kabupaten Bima diklasifikasikan sebagai Inceptisols. Tanah ini diklasifikasikan menjadi empat Sub Grup tanah. Diantara keempat Sub Grup tanah tersebut, Typic Haplustepts merupakan yang terluas mencapai 49,38% dari luas kabupaten.
- c) Selain kedua Ordo tanah di atas (Entisols dan Inceptisols), juga dijumpai Ordo Vertisols dan Andisols, masing-masing 5,24% dan 4,56% dari luas kabupaten. Vertisols umumnya dijumpai di daerah pelembahan, sebaliknya Andisols yang dijumpai pada lereng tengah hingga lereng atas volkan.

### **E. Hidrologi**

“Kondisi hidrologi wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan Wilayah Kabupaten Bima adalah kondisi genangan, sungai dan mata air. Sebagian kecil areal dari wilayah Kabupaten Bima dipengaruhi oleh pasang surut air laut seluas 7 Ha (0,002 %) dan rawa yang tergenang terus-menerus seluas 287 Ha (0.066 %). Daerah wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran

antara 5 sampai 38 km. Dari sungai-sungai yang berjumlah 34 sungai sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk irigasi.

### F. Klimatologi

Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidth dan Ferguson, 1951). Keadaan curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Bima relatif pendek, penyebarannya pun tidak merata, dimana pada bulan Mei-Oktober curah hujan relatif kecil dan jarang terjadi. Keadaan dan distribusi curah hujan serta suhu udara setiap wilayah kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Bima bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di**  
**Kabupaten Bima 2015**

<b>Bulan/Month</b>	<b>Curah Hujan (mm<sup>3</sup>)</b>	<b>Hari Hujan</b>
(1)	(2)	(3)
Januari/ <i>January</i>	299,00	24
Februari/ <i>February</i>	129,00	19
Maret/ <i>March</i>	159,00	20
April/ <i>April</i>	114,00	16
Mei/ <i>May</i>	8,00	3
Juni/ <i>June</i>	0,00	1
Juli/ <i>July</i>	0,00	2
Agustus/ <i>August</i>	2,00	1
September/ <i>September</i>	0,00	1
Oktober/ <i>October</i>	0,00	2
November/ <i>November</i>	39,00	6
Desember/ <i>December</i>	202,00	24

*Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016*

**Tabel 4.3**  
**Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di**  
**Kabupaten Bima 2015**

Bulan/Month	Suhu Udara			Kelembaban Udara <i>Humidity</i>
	Temperature (°C)			(%)
	Maks	Min	Rata-rata	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	32,80	24,50	28,65	85,00
Februari/February	32,50	23,70	28,10	86,00
Maret/March	33,10	23,90	28,50	84,00
April/April	32,40	24,30	28,35	85,00
Mei/May	32,50	22,50	27,50	82,00
Juni/June	31,70	23,30	27,00	80,00
Juli/July	31,80	20,90	26,35	79,00
Agustus/August	32,50	21,10	26,80	78,00
September/September	34,30	22,00	28,15	74,00
Oktober/October	35,20	23,20	29,20	73,00
November/November	36,90	25,50	31,20	75,00
Desember/December	34,30	25,40	29,85	87,00

*Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016*

### **G. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagian besar adalah kawasan hutan seluas 287.461,02 Ha (65,49%) dan persawahan seluas 27.337,80 Ha (6,23%). Sedangkan penggunaan lahan yang terkecil adalah kebun seluas 420,7 Ha (0,10%). rincian penggunaan lahan di daerah Kabupaten Bima dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Luas Lahan berdasarkan Jenis Penggunaanya**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Permukiman	3.097,83	0,71
2	Industri	-	-
3	Pertambangan	-	-
4	Persawahan	27.337,80	6,23
5	Pertanian Tanah Kering semusim	40.144,78	9,15
6	Kebun	420,70	0,10
7	Perkebunan	2.603,54	0,59
8	Padang	74.517,69	16,98
9	Hutan	287.461,02	65,49
10	Perairan Darat	1.817,67	0,41
11	Tanah Terbuka	998,37	0,23
12	Lain-lain	540,60	0,12
Kab. Bima		<b>438.940,00</b>	

*Sumber Data : BPN Kab. Bima, 2015*

#### **4.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bima telah didesain melalui pengembangan kawasan strategis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- a) Kawasan Strategis Propinsi di wilayah Kabupaten Bima :
  1. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (tambak), pariwisata dan fungsi transportasi;
  2. Kawasan Waworada-Sape dan sekitarnya (Kecamatan Sape, Lambu, Wawo, dan Langgudu) dengan sektor unggulan perikanan, industri, dan pertanian;



3. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora;
  4. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang;
- b) Kawasan Strategis Kabupaten Bima dengan sudut kepentingan ekonomi :
1. Kawasan Lewamori, meliputi Kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa, Kawasan Minapolitan, yang berpusat di Desa Penapali Kecamatan Woha dan Kawasan Pariwisata di Pantai Kalaki;
  2. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan;
  3. Kawasan Strategis Wera yang meliputi Pai dan Oi Tui dengan sektor unggulan peternakan (sapi), perikanan (rumput laut), dan Pariwisata.
  4. Kawasan Strategis Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro O'o, Waworada, Tolo Uwi, dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (rumput laut), perikanan tangkap, dan pariwisata (pantai wane dan pantai rontu).
  5. Kawasan Strategis Lambu yang meliputi Sumi dan Nggelu dengan sektor unggulan peternakan (sapi), pertanian (jagung), dan perikanan tangkap.
- c. Kawasan strategis dengan sudut Kepentingan Lingkungan Hidup adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Banta;
- d. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Strategis Cagar Budaya yang meliputi :
1. Kompleks rumah adat-Wawo;
  2. Perkampungan tradisional Sambori;

3. Perkampungan tradisional Mbawa-Donggo;
  4. Kompleks Dana Mbojo-Donggo; dan
  5. Situs Wadu Pa'a-Soromandi
- e. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang meliputi :
1. Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
  2. Kawasan peruntukan basis militer, daerah ujicoba sistem persenjataan dan /atau kawasan industri sistem persenjataan;
  3. Pembatasan dan penataan antara lahan terbangun disekitar pertahanan dan keamanan; dan
  4. Penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan.

Adapun rencana Pembagian Zona Wilayah Pesisir dan Laut, sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bima dikelompokan ke dalam 5 (lima) kawasan pengembangan, yang terdiri dari :

1. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya;
2. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
3. Kawasan Sape dan sekitarnya;
4. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.

### **4.3. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bima berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **A. Kawasan Rawan Tanah Longsor**

Ada 2 (dua) tipe lokasi atau kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bima terdiri atas rawan tanah longsor Tipe A yang meliputi kawasan sekitar Tambora Bagian Timur, Paradowane, dan Karumbu, sedangkan rawan longsor tanah yang meliputi beberapa kawasan Tambora di Bagian daerah Timur serta sekitar pegunungan Kuta.

#### **B. Kawasan yang Rawan terhadap Bencana Gunung Berapi**

Di Kabupaten Bima terdapat 2 (dua) gunung berapi yang berstatus masih aktif yaitu Gunung Tambora dan Gunung Sangiang.

##### **1. Kawasan rawan gunung berapi Tambora**

Daerah yang masuk kategori waspada meliputi jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga).

##### **2. Kawasan rawan gunung berapi Sangiang**

Daerah yang masuk kategori terlarang meliputi daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km<sup>2</sup> yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu,

Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sosi Panda, Sori Iso dan Sori Berano.

**C. Kawasan Rawan Banjir**

Kawasan yang masuk kategori rawan banjir di Kabupaten Bima meliputi Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

**D. Kawasan Rawan Tsunami**

Kawasan yang masuk kategori rawan tsunami di Kabupaten Bima meliputi Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

**E. Kawasan Rawan Angin Topan**

Kawasan yang masuk kategori rawan angin topan di Kabupaten Bima meliputi wilayah Kecamatan Woha dan daerah sekitarnya, serta wilayah monta dan daerah sekitarnya.

**F. Kawasan Rawan Gelombang Pasang**

Kawasan yang masuk kategori rawan gelombang pasang di Kabupaten Bima meliputi pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Soromandi dan daerah sekitarnya, Sape dan Lambu, Wera, Langgudu dan daerah sekitarnya

#### **G. Kawasan Rawan Kekeringan**

Kawasan yang masuk kategori rawan kekeringan di Kabupaten Bima meliputi Sila, Paradowane, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

#### **H. Kawasan Rawan Abrasi Pantai**

Kawasan yang masuk kategori rawan abrasi pantai di Kabupaten Bima tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Bima

#### **I. Kawasan Rawan Gempa Bumi**

Kawasan yang masuk kategori rawan gempa bumi di Kabupaten Bima tersebar di daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (modified mercally intensity)

### **4.4. Demografi**

Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat peristiwa kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Analisis kependudukan merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi atau tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan Pencatatan Kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain. Secara khusus UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## A. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan dari hasil Sensus Kependudukan Tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, mencapai 443.663 jiwa, artinya dalam setiap tahun rata-rata penambahan penduduk Kabupaten Bima mencapai 4.230 jiwa atau memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,01% dan pada tahun 2015. Jumlah ini terdiri dari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.

Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2011	220.981	222.682	443.663	1,01
2012	222.883	224.403	447.286	0,82
2013	224.454	226.522	450.976	0,82
2014	230.649	232.770	463.419	2,76
2015	233.288	235.394	468.682	1,14

*Sumber Data: Bima Dalam Angka 2016*

## B. Struktur dan Komposisi Penduduk

Pengelompokkan penduduk menurut umur oleh badan Pusat Statistik (BPS) dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Penduduk Kabupaten Bima menurut kelompok umur dari hasil sensus penduduk tahun 2011 dan keadaan tahun 2015 sebagaimana pada tabel berikut

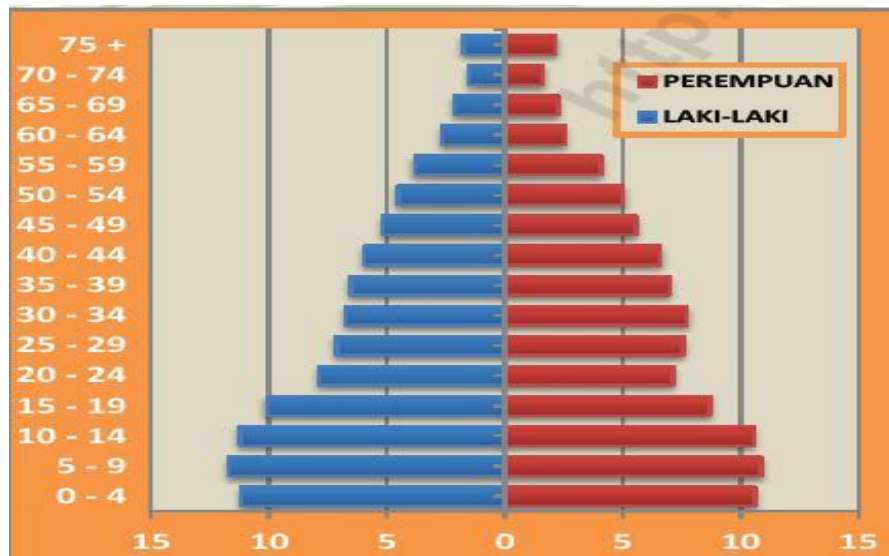
**Tabel 4.6****Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Tahun 2011			Tahun 2015		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	24.435	23.047	47.482	24.620	50.242	50.242
5 – 9	26.260	24.555	50.815	25.631	53.030	53.030
10 – 14	26.314	24.986	51.300	24.750	50.790	50.790
15 – 19	22.147	20.123	42.270	20.216	43.648	43.648
20 – 24	16.064	16.740	32.804	16.519	34.973	34.973
25 – 29	16.950	18.436	35.386	17.562	34.169	34.169
30 – 34	15.159	16.638	31.797	17.998	33.583	33.583
35 – 39	14.791	15.278	30.069	16.570	31.766	31.766
40 – 44	12.272	13.446	25.718	15.658	29.611	29.611
45 – 49	10.683	11.296	21.979	13.335	25.563	25.563
50 – 54	9.714	10.566	20.280	12.022	22.737	22.737
55 – 59	7.135	7.188	14.323	9.898	18.941	18.941
60 – 64	5.641	5.595	11.236	6.254	12.598	12.598
65 +	11.194	12.575	23.769	14.361	27.031	27.031
<b>Total</b>	<b>218.759</b>	<b>220.469</b>	<b>439.228</b>	<b>233.288</b>	<b>235.394</b>	<b>468.682</b>

*Sumber Data: Bima Dalam Angka 2016*

Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

**Gambar 4.3. Piramida Penduduk  
Kabupaten Bima Tahun 2015**



*Sumber: BPS Kab. Bima, 2016*

Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Bima termasuk tipe ekspansif, ditandai dengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang jauh lebih lebar dibandingkan dengan usia di atasnya dan bagian atas yang menunjukkan usia lansia cenderung mengecil sejalan dengan meningkatnya umur.

### **C. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bima mencapai 106 jiwa per kilometer persegi. Namun demikian penduduk Kabupaten Bima menyebar secara tidak merata pada 18 kecamatan wilayah administrasi Kabupaten Bima. Ketidak-merataan persebaran penduduk Kabupaten Bima dapat diketahui dari jumlah sebaran dan tingkat kepadatan penduduk per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut



**Tabel 4.7****Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima**

No.	Kecamatan	Luas / Area (Km <sup>2</sup> )	Penduduk		Kepadatan
			Jumlah	%	
1.	Monta	227,52	35.697	7,62	157
2.	Parado	261,29	9.282	1,98	36
3.	Bolo	66,93	47.175	10,07	705
4.	Madapangga	237,58	29.210	6,23	123
5.	Woha	105,57	46.856	10,00	444
6.	Belo	44,76	26.579	5,67	594
7.	Palibelo	71,58	26.453	5,64	370
8.	Wawo	132,29	17.364	3,70	131
9.	Langgudu	322,94	28.067	5,99	87
10.	Lambitu	65,40	5.433	1,16	83
11.	Sape	232,12	56.572	12,07	244
12.	Lambu	404,25	36.578	7,80	90
13.	Wera	465,32	29.943	6,39	64
14.	Ambalawi	180,65	19.391	4,14	107
15.	Donggo	123,83	17.888	3,82	144
16.	Soromandi	341,66	16.499	3,52	48
17.	Sanggar	477,89	12.624	2,69	26
18.	Tambora	627,82	7.071	1,51	11
Jumlah		4.389,40	468.682	100,00	3.465

*Sumber: Bima Dalam Angka 2015*

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Bolo merupakan kecamatan dengan tingkat sebaran penduduk terpadat yakni sebanyak 705 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Tambora dengan kondisi wilayah yang luas memiliki tingkat sebaran penduduknya relatif sedikit, dengan tingkat sebaran dan kepadatan penduduk hanya 11 jiwa per kilometer persegi.

#### D. Pengelompokan Penduduk berdasarkan Angkatan Kerja

Pengelompokan penduduk di Kabupaten Bima yang termasuk angkatan kerja (usia 15 tahun keatas) mencapai 195 337 jiwa, dengan jenis pekerjaan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Persentase Angkatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun**  
**Menurut Sektor dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2015**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	58.778	39.670	98.448
2	Pertambangan dan Penggalian	4.666	677	5 343
3	Industri Pengolahan	6.210	6 872	13 082
4	Listrik, Gas, dan Air	0	0	0
5	Bangunan	5 050	0	5 050
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	8 839	21 500	30 339
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	8 657	0	8 657
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	352	179	531
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	16 806	17 081	33 887
<b>Jumlah</b>		<b>109 358</b>	<b>85 979</b>	<b>195 337</b>

*Sumber Data : Bima Dalam Angka 2016*

#### **4. 5. Indikator-Indikator Kinerja**

1. Indikator kinerja yang sudah melampaui target Tahun 2015 berjumlah 32

indikator terdiri dari :

1. Prosentase penurunan jumlah pengangguran.
2. Peningkatan PDRB perkapita
3. Meningkatnya ketersediaan stok pangan terutama beras
4. Tercapainya target Bumi Sejuta Sapi Provinsi NTB
5. Meningkatnya produksi dan usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan
6. Angka partisipasi kasar SD
7. Rasio lokal/kelas dengan jumlah murid SMP
8. Rasiolokal /kelas dengan jumlah murid SMA
9. Meningkatnya jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
10. Menekan angka kematian balita
11. Menekan angka prevalensi malnutrisi anak
12. Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak
13. Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan
14. Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk
15. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
16. Meningkatnya Akseptor KB Aktif
17. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

18. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK.
  19. Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan
  20. Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA)
  21. Meningkatnya jumlah pengajian oleh majelis taklim
  22. Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perjinahan, dan Perjudian
  23. Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal
  24. jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara
  25. Luas kawasan lindung
  26. Jumlah TPA dan TPS
  27. Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD
  28. Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD
  29. Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang
  30. Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundang-undangan
  31. Menurunnya angka kriminilitas, tindak kekerasan/kejahatan
  32. Terbangunnya pasar kecamatan / desa yang akan melayani kebutuhan bagi masyarakat pada lokasi dan Hinterlandnya.
2. Indikator kinerja yang sudah melampaui target Tahun 2014 berjumlah 1 indikator terdiri dari :
    1. Terselenggaranya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
  3. Indikator kinerja yang sesuai dengan target kinerja berjumlah 12 indikator  
Terdiri dari :

1. Meningkatnya Angka melek huruf s/d 100% pada tahun 2015
  2. kegiatan Promosi pariwisata
  3. Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan Debit Mata Air
  4. Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau
  5. Luas Peruntukan Lahan Sawah Abadi
  6. Luas hutan bakau
  7. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan bencana
  8. Terbentuknya unit pelayanan terpadu dan berkembangnya sistem pelayanan satu atap
  9. Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten
  10. Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
  11. Terpeliharanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
  12. Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI)
4. Indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja berjumlah 20 Indikator, terdiri dari :
1. Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin
  2. paritas daya beli masyarakat
  3. Meningkatnya profit margin produk pertanian dan perikanan
  4. Meningkatnya Rata-rata lama sekolah, terutama tingkat pendidikan dasar s/d 12 tahun pada Tahun 2015
  5. Angka partisipasi kasar SMP
  6. Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SD s/d 100% pada Tahun 2015

7. Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMP s/d 100% pada Tahun 2015
  8. Meningkatnya jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini s/d Tahun 2015
  9. Meningkatkan angka harapan hidup menjadi 72,54 tahun sampai dengan tahun 2015
  10. Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
  11. Menekan angka kematian bayi
  12. Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih
  13. Menekan prevalensi malaria
  14. Tersedianya aparatur
  15. Peraturan Daerah
  16. Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah
  17. Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  18. Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan
  19. Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan
  20. Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat
5. Indikator kinerja yang jauh dari target kinerja berjumlah 19 Indikator, terdiri dari :
1. Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu
  2. Menekan prevalensi TBC

3. Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) sampai 100% pada tahun 2015
4. Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih sampai 100% pada tahun 2015
5. Rasio sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk
6. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji
7. Menurunnya kasus perladangan liar dan Ilegal Logging
8. Menurunnya Luas lahan kritis
9. Jumlah dokumen Amdal
10. Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan
11. Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima
12. Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten.
13. Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten.
14. Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota Kabupaten.
15. Terbangunnya pelabuhan perintis/Cargo, Pelabuhan Nusantara
16. Terbangunnya pelabuhan tradisonal
17. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih
18. Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis
19. Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen

#### **4.6. Tata Ruang Wilayah.**

Penataan ruang, seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (UUPR) mencakup tiga proses yang saling berhubungan, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam undang-undang tersebut secara eksplisit digariskan pelaksanaan pembangunan harus senantiasa sesuai dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang ada. Dengan demikian penataan ruang menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan sebagai pengikat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa permasalahan penataan ruang Kabupaten Bima adalah :

- a) Masih terjadinya konflik kepentingan antar sektor seperti: pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya;
- b) Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan dan mensinkronkan berbagai rencana program sektor. Berbagai fenomena bencana seperti banjir dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah Kabupaten Bima merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan.
- c) Tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.
- d) Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini terjadi karena belum efektifnya upaya-upaya



pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, sehingga penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan norma yang seharusnya ditegakkan masih terus berlangsung, kenyataan menunjukkan bahwa proses alih fungsi peruntukan lahan dari lahan pertanian maupun kehutanan menjadi permukiman maupun bentuk lainnya tanpa memperhatikan peruntukan lahan sesuai tata ruang masih terus berlangsung.

- e) Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang berbagai regulasi dalam hal pemanfaatan ruang.

Dengan memperhatikan uraian tersebut maka untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual dalam pembangunan, maka prinsip-prinsip penataan ruang tidak dapat diabaikan lagi. Untuk itu maka upaya pengendalian pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektor melalui instrumen penataan ruang. Oleh karena itu strategi pembangunan jangka menengah daerah dalam bidang penataan ruang harus mampu menjadikan dokumen perencanaan tata ruang sebagai salah satu acuan bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah. Berbagai langkah dan strategi kongkrit yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. :

- a) Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara berbagai sektor yang memanfaatkan ruang, maka regulasi tentang prosedur pemanfaatan ruang harus tegas dan jelas sehingga setiap pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang.
- b) Dalam rangka optimalisasi fungsi rencana tata ruang maka berbagai dokumen perencanaan sektor harus selaras, sinkron dan terpadu dengan

dokumen rencana tata ruang, sehingga tidak ada pelaksanaan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan rencana tata ruang.

- c) Agar dokumen tata ruang sepenuhnya dijadikan acuan bagi pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, maka mulai dari tahapan perencanaan tata ruang sampai pada proses pengendalian pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, sehingga dokumen tata ruang yang dihasilkan di fahami dan dilaksanakan dengan baik.
- d) Lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang harus di atasi dengan penerapan sanksi yang tegas bagi yang melanggar dan pemberian insentif bagi yang taat terhadap ketentuan yang ada. Disamping itu frekuensi koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penataan ruang perlu lebih diintensifkan sehingga berbagai kendala dan permasalahan penataan ruang yang ada dapat segera di pecahkan secara bersama-sama.
- e) Sosialisasi dan advokasi tentang rencana tata ruang perlu lebih diintensifkan kepada masyarakat mengingat sebagian besar pelanggaran terhadap tata ruang di Kabupaten Bima disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang ada dalam rencana tata ruang.

Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bima dengan Kota Bima sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima membawa konsekuensi terhadap Pemerintahan Kabupaten Bima untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayahnya termasuk didalamnya untuk

melakukan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten. Di samping itu, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, maka setiap daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayahnya (RTRW) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut termasuk daerah Kabupaten Bima.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima menjadi sangat strategis untuk segera dilakukan dalam kerangka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pemindahan ibu kota Kabupaten Bima akan berdampak positif bagi berkembangnya perekonomian Kabupaten Bima dengan berkembangnya pusat pertumbuhan baru karena akan terjadi pengalihan arus barang dan jasa yang selama ini mengalir ke kota bima akan beralih ke wilayah Kabupaten Bima. Dengan terjadinya perputaran arus barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bima, secara langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator terjadinya peningkatan status perekonomian Kabupaten Bima. Peningkatan status perekonomian ini akan memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena berbagai aktifitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bima ini tentunya akan berimbas pada adanya transaksi barang dan jasa sehingga tentunya akan disertai dengan pembayaran pajak maupun retribusi kepada daerah.

Begitu penting dan strategis Pemindahan lokasi ibu kota Kabupaten Bima ini sehingga merupakan program yang sangat prioritas untuk dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah kedua dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Bima. Dalam rangka melakukan pemindahan ibu kota ini berbagai

langkah dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan terkait sudah dilalui seperti keluarnya Peraturan Pemerintah tentang pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Bima ke wilayah Woha, maupun proses yang sedang berlangsung yaitu penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima yang menjadi dasar hukum bagi dimulainya proses pembangunan di lokasi Ibu Kota yang baru. Namun demikian, secara umum proses pemindahan ibukota ini masih dihadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan di antaranya :

- a) Masih belum tuntasnya penyelesaian Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Bima yang terhadang oleh berbelitnya aturan dan prosedur yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- b) Terhadangnya proses pembangunan sebagai akibat dari alotnya proses pembebasan lahan.
- c) Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di lokasi Ibukota yang baru.

Berbagai permasalahan tersebut akan di atasi dengan strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan frekwensi koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

- b) Proses pembebasan lahan terus dilakukan melalui pendekatan, sosialisasi dan dialog secara intensif dengan masyarakat pemilik lahan;
- c) Dalam rangka mengatasi permasalahan terbatasnya sumber pendanaan berbagai upaya strategis akan dilakukan diantaranya disamping dengan mengarahkan prioritas pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana APBD Kabupaten pada lokasi Ibu Kota Kabupaten Bima yang baru, langkah lain yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan sumber pendanaan dari APBD maupun dari APBN.

